



## DUGAAN KORUPSI PENGADAAN BAJU BATIK DI PEMKO DUMAI ✓

# Dugaan Awal Terindikasi di 37 SKPD

**PEKANBARU (HR)**- Dugaan terjadinya tindak pidana korupsi penyimpangan anggaran dalam pengadaan baju batik di lingkungan Pemerintah Kota Dumai diduga terjadi di sekitar 37 Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemko Dumai.

Hal itu diungkapkan Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) III Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau, AKBP Yusuf Rahmanto, Senin (17/11). Dijelaskannya, saat

ini penyidik mulai melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi yang menggunakan dana dari APBD Perubahan Kota Dumai tahun 2013 sebesar Rp2,2 miliar.

"Kita telah melakukan

### **DODI FERDIAN**

#### Liputan Pekanbaru

pemeriksaan terhadap puluhan saksi dan pengumpulan dokumen," ujar Yusuf.

Adapun saksi yang telah diperiksa, sebanyak 30 orang saksi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada 15 SKPD, diantaranya, Dinas Pendidikan, Pekerjaan Umum, dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Para saksi yang dimintakan keterangan

tersebut beberapa saksi merupakan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Sekretaris Kota (Sekko) Dumai.

"Sudah ada 30 saksi dari dinas-dinas yang diperiksa. Saya lupa, tapi diantaranya pendidikan, PU, BKD. Diantaranya (kasus) ada 37 SKPD dan yang baru kita periksa 15 SKPD. Ada juga dua pelaksana kerjanya yang diperiksa," lanjut Yusuf.

Saat ditanya, berapa dugaan kerugian negara yang ditimbulkan akibat penga-

daan baju batik di Kota Dumai tersebut, Yusuf mengatakan hingga saat ini masih belum bisa disimpulkan.

"Belum sampai ke sana (penghitungan kerugian negara, red). Kita baru melakukan pengumpulan dokumennya saja dan belum semuanya kita kumpulkan untuk dijadikan bukti," terangnya.

Untuk diketahui, pengadaan baju batik untuk 37 SKPD ini, dalam pelaksanaannya diduga terjadi *mark up* ratusan juta rupiah. \*\*\*